

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Salah satu ilustrasinya adalah peningkatan standar pendidikan yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dengan pendidikan yang berkualitas tinggi, selain itu sektor publik dan swasta juga harus bekerja sama. Untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja di industri, penting juga untuk mengembangkan sistem pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja.

Menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers, aktualisasi diri adalah proses dimana seseorang menggunakan seluruh kemampuannya menjadi apa yang mampu untuk mengaktualisasikan, atau mencapai potensinya¹, maka dari itu pendidikan harus menempatkan prioritas tinggi pada perkembangan pribadi, emosional, dan sosial siswa. Mengembangkan sikap hangat, penuh kasih, dan inklusif sambil berfokus pada kebutuhan dan kemungkinan setiap individu. Pendidikan berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan diperlukan untuk sukses dalam hidup, selain itu juga untuk memperluas pengetahuan akademis. Berkembangnya peserta didik agar

¹ Ririn Muthiatun Nisa. 2017. Kreativitas dalam Psikologi Humanistik dan Implikasinya dalam Pendidikan. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*. 4(1): 259-280.

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab merupakan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003², yang menjadi acuan semua penyelenggara pendidikan pada tingkat makro, meso, dan mikro.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 42 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan formal mengikuti jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.³ Pra sekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan tinggi membentuk jalur khas lembaga pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan formal sekurang-kurangnya sampai tingkat sekolah menengah pertama, menurut sistem pendidikan nasional. Tumbuhnya manusia Indonesia seutuhnya merupakan tujuan dari lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan nonformal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara sistematis dan berjenjang berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang

² Jefry V. Roeroe Rizky Rinaldy Inkiriwang, Refly Singal. 2020. Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Quarterly Journal of Health Psychology*. 8(32): 143–152.

³ Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003, ‘Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003’, UU Sisdiknas, 2003, 13.

mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga yang tersedia bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti, atau menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang tertentu.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui peningkatan kurikulum. Memperbarui kurikulum untuk memastikannya tetap relevan dengan kebutuhan kontemporer, persyaratan siswa, dan sudut pandang global. Kurikulum yang menyeluruh, seimbang, dan relevan dapat membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang sesuai untuk masa depan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan program pendidikan “Bebas Belajar” dengan mengembangkan program kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan standar pendidikan. Program Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di samping kemampuan belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kecakapan guru yang menjadi ujung tombak pendidikan sangat menentukan keberhasilan program Merdeka Belajar.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 262 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran⁴, SD/MI yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, bahwa terdapat kebijakan yang memberikan kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mempertimbangkan informasi lebih lengkap dan merefleksikan kesiapan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penetapan satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka, Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023 dan 2023/2024.

Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya yang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum Merdeka didasarkan pada semangat kemandirian, kreativitas, dan inovasi dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan kemungkinan pengembangan karir artinya peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan potensi dirinya dengan menggunakan Kurikulum Merdeka. Melalui beragam pilihan studi dan kegiatan ekstrakurikuler, kurikulum ini memperluas wawasan siswa. Siswa

⁴ Sri Yulastuti, Isa Ansori, & Moh. FATHURRAHMAN. 2022. Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Kewirausahaan Kelas 4 SD Labschool UNNES Kota Semarang. *Lembaran Ilmu Kependidikan*. 51(2): 76–87.

harus lebih siap untuk mulai bekerja, atau untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sebagai akibat dari ini.

Tahapan implementasi Kurikulum Merdeka: 1) Mandiri Belajar adalah satuan pendidikan yang menerapkan struktur Kurikulum Merdeka namun tetap menggunakan kurikulum 2013/kurikulum darurat, 2) Mandiri Berubah adalah satuan pendidikan mengembangkan kurikulumnya dengan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dan melaksanakan pembelajaran dan penilaian dengan berpedoman pada Kurikulum Merdeka, dan 3) Mandiri Berbagi adalah Satuan pendidikan berjanji untuk berbagi praktik terbaik dengan satuan pendidikan lain dengan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka untuk menyusun kurikulumnya dan prinsip Kurikulum Merdeka untuk menerapkan pembelajaran dan penilaian.⁵

Untuk tahun ajaran 2022/2023, SDIT Fitrah Hanniah menerapkan kurikulum merdeka di setiap kelas. Pihak sekolah memilih menerapkan kurikulum merdeka di semua kelas, meski hanya diterapkan di kelas I dan IV atas permintaan pemerintah. Ada 3 pilihan yang bisa dipilih sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022/2023. Pilihan-pilihan ini termasuk mandiri berbagi, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. SDIT Fitrah Hanniah memutuskan untuk memilih kategori mandiri berbagi.

⁵ Johar Alimuddin. 2023. Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Kontesktual*. 4(02): 67–75.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kendala implementasi kurikulum merdeka di SDIT Fitrah Hanniah, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kurikulum merdeka di SDIT Fitrah Hanniah. Diharapkan untuk ditemukan strategi yang paling tepat untuk menerapkan kurikulum merdeka di jenjang Sekolah Dasar (SD).

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi guru, siswa dan wali murid dalam implementasi kurikulum merdeka di SD antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman guru akan perlunya untuk mempelajari kurikulum merdeka masih kurang.
2. Pelatihan yang tersedia bagi guru untuk implementasi kurikulum merdeka masih kurang
3. Ketidakpastian mengenai tugas dan tanggung jawab pihak sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Guru menghadapi kesulitan dalam mengatasi rintangan, atau hambatan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka
5. Kurang efektifnya komunikasi antara atasan dan bawahan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka
6. Tidak mendapat sambutan hangat dari sebagian orang tua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah teridentifikasi, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pembelajaran IPAS pada Kurikulum Merdeka?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran IPAS di SD?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu kembali pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran IPAS pada Kurikulum Merdeka
- b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran IPAS di SD

E. Manfaat Penelitian

Keuntungan berikut diantisipasi dari temuan penelitian:

- a. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah, khususnya guru dalam penyampaian materi pelajaran IPAS sesuai kurikulum merdeka.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan kepala sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolah.